

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	www.beritasatu.com
Media Cetak	

Pemprov DKI: Kampung Akuarium Diizinkan untuk Rumah Susun

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan, penataan Kampung Susun Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara tidak melanggar aturan.

Penataan tersebut masih sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Berdasarkan Perda 1/2014 tentang RDTR & PZ, lokasi pembangunan berada di Sub zona Pemerintah Daerah atau P3," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko saat dihubungi, Selasa (18/8/2020).

Karena wilayah Akuarium berada di subzona P3, kata Sarjoko, maka diizinkan untuk membangun rumah susun. "Rumah susun yang diselenggarakan oleh pemerintah," tandas dia.

Sarjoko tidak menjelaskan secara detail tentang dasar hukum terkait kegiatan pembangunan rumah susun sebagaimana diatur dalam Perda RDTR. Dia mempersilakan para awak media untuk konfirmasi ke Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang (Dinas Citata) DKI Jakarta.

"Terkait hal ini penjelasan lebih detail, bisa konfirmasi dengan Dinas Citata," pungkas dia.

Pernyataan Sarjoko ini membantah apa yang disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono yang menilai langkah Gubernur DKI, Anies Baswedan, melakukan penataan Kampung Akuarium, Penjaringan, melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR.

Menurut Gembong, seharusnya Anies mengacu pada Perda RDTR ini dalam menata wilayah-wilayah di Jakarta.

"Anies melanggar Perda RDTR karena lahan itu (wilayah Akuarium) masuk dalam zona merah," ujar Gembong saat dihubungi, Selasa (18/8/2020).

Gembong menjelaskan, wilayah Akuarium sesuai RDTR, bukan untuk permukiman. Namun, lahan tersebut masuk zona merah yang peruntukannya untuk pemerintahan, seperti kantor kecamatan atau kantor kelurahan.